

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dakwah *Siyasah*

1. Definisi Dakwah *Siyasah*

Dalam konteks kehidupan beragama, istilah "dakwah" sering kali menjadi pusat perhatian karena perannya yang krusial dalam menyebarkan ajaran agama. Dakwah memiliki makna seruan, panggilan, atau doa. dakwah merupakan cara untuk memanggil, menyerukan serta mengajak manusia ke jalan yang diridhai Allah SWT. Dakwah memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan beragama, karena melalui seruan dan ajakan yang tulus, kita tidak hanya menyebarkan nilai-nilai kebaikan tetapi juga memperkuat ikatan spiritual antara individu dan Allah SWT (Sukayat, 2009: 1).

Konsep politik tidak hanya dianggap sebagai aktivitas kekuasaan semata, tetapi juga sebagai bagian integral dari tata kelola kehidupan umat yang harus dikelola dengan bijaksana. Menurut perspektif Islam, politik lebih dikenal dengan istilah *siyasah*, yang merujuk pada ilmu yang mengurus urusan umat. Namun, ada juga pengertian lain yang menyatakan bahwa politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, yang melibatkan proses pengambilan keputusan, terutama dalam konteks negara (Hafsah, 2011: 1).

Dalam bahasa Arab, konsep *siyasah* memiliki akar yang dalam dan makna yang luas terkait dengan pengelolaan urusan masyarakat. konsep *siyasah* berasal dari kata *as-saus* yang berarti pengelolaan. Jika seseorang disebut *sasa al-amr*, artinya dia mengurus urusan. Dalam konteks ini, berpolitik berarti melakukan tindakan

yang menguntungkan masyarakat atau sekelompok orang. Hal ini mencerminkan bahwa *siyasah* tidak hanya melibatkan aspek politik, tetapi juga mencakup manajemen dan pengaturan urusan umat dengan penuh tanggung jawab dan keahlian (Takariawan, 2009: 82).

Dakwah *Siyasah* merupakan proses kegiatan dakwah yang tergabung dalam ruang lingkup politik untuk berdakwah didalam pemerintahan khususnya untuk negara negara muslim agar kebijakan pemerintah tetap berdasarkan yang ada didalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Hubungan antara dakwah dan *siyasah* pada pandangan awalnya mungkin terlihat tidak lazim. Namun, jika dakwah dipahami secara menyeluruh, dakwah mencakup berbagai aspek kehidupan seperti keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, termasuk juga politik. Dalam konteks yang lebih luas, dakwah dapat menggunakan semua jalur ini, termasuk politik, sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Dalam sejarahnya, Rasulullah Saw selama periode dakwah di Madinah tidak terlepas dari politik, terutama karena beliau diakui sebagai pemimpin di kota tersebut pada waktu itu (Aziz, 2020: 70).

Dakwah *siyasah* memainkan peran krusial dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk politik dan pemerintahan. Melalui dakwah *siyasah*, wewenang, birokrasi, dan kekuasaan politik lainnya dapat dijadikan alat untuk memajukan ajaran Islam. Pada dasarnya, politik atau *siyasah* berkaitan dengan pengelolaan urusan masyarakat. Dengan berpartisipasi dalam politik, seseorang menunjukkan kepedulian terhadap kondisi umat Islam, berupaya menghilangkan kezaliman dari pihak penguasa, dan

memberantas kejahatan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam (Aziz, 2020: 19).

Secara keseluruhan, ajaran Islam mengajarkan segala aspek kehidupan seorang Muslim, mulai dari aspek individu, keluarga, masyarakat sosial, hingga politik negara. Petunjuk Islam mengatur segala hal, dari hal-hal kecil seperti bersuci hingga urusan kepemimpinan pemerintahan. Islam mengatur hubungan baik dalam keadaan damai maupun dalam situasi perang (Al Qaradhawi, 2018: 9).

Mengenai dakwah *siyasah*, berdakwah merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Muslim yang baik ialah Muslim yang peduli terhadap lingkungan terutama dalam berdakwah pada ruang lingkup politik. Berdakwah bisa dilakukan dimana saja dan dengan apa saja termasuk dakwah didalam pemerintahan agar tetap menjaga dan mencegah dari hal hal yang bersifat kemunkaran.

2. Relevansi Dakwah dan *Siyasah*

Siyasah bukan hanya sekadar kegiatan politik, tetapi merupakan tanggung jawab pribadi yang diemban oleh setiap individu sebagai bagian dari ibadah dan amanah. Dalam pandangan Islam, *siyasah* adalah tanggung jawab yang harus diemban oleh manusia sendiri. Ajaran agama hanya memberikan garis-garis besar mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh seorang Muslim dalam berpolitik atau berpemerintahan. Manusia diberikan akal untuk memikirkan cara terbaik untuk mengatur urusan dunianya. Ini merupakan keinginan Allah ketika menciptakan manusia sebagai sebaik-baiknya pemimpin yang dikirim ke muka bumi ini (Izza, 2017: 79).

Ada pandangan yang menyatakan bahwa esensialnya tidak ada pemisahan yang jelas antara dakwah dan politik karena politik dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari agama. Oleh karena itu, banyak yang meyakini bahwa tidak perlu menjauhi keterlibatan politik. Hal ini disebabkan oleh dorongan kepentingan berdakwah melalui jalur politik atau keterlibatan dalam jaringan politik yang sulit dihindari, sehingga banyak umat Islam terlibat dalam ranah politik (Azra, 1999: 36).

Dakwah dan *siyasah* adalah dua hal yang saling keterkaitan, dimana dakwah tidak hanya meliputi dan menjangkau dimensi spritual tetapi juga memberikan panduan terhadap prinsip-prinsip yang diimplementasikan dalam kehidupan sosial dan politik umat.

Pentingnya dakwah *siyasah* ini menjadi topik menarik untuk dipelajari, terutama di tengah sikap apatis dan prasangka sebagian umat Islam terhadap politik, serta pemahaman yang berlebihan tentang konsep khilafah di Indonesia. Dakwah politik yang dilakukan oleh Rasulullah dan para khalifah dalam sejarah dapat ditelusuri, dievaluasi keberhasilannya, dan dibandingkan dengan konteks zaman sekarang. Karena Nabi Muhammad Saw menyampaikan seruan tentang perintah dan kewajiban dakwah melalui Al-Qur'an, menjadi lebih objektif jika konsep dakwah struktural ini juga dipelajari secara mendalam dari sumber utama inspirasi dan panduan moral umat Islam, yaitu Al-Qur'an (Aziz, 2020: 9).

Antara dakwah dan *siyasah* terdapat keterkaitan yang kompleks untuk kehidupan umat Islam. Sebagai umat Islam yang sudah beranjak ke masa *baligh* memiliki kewajiban untuk turut membantu, menyerukan, serta menyebar luaskan

ajaran agama islam di ruang lingkup apapun dan dimana pun termasuk pada ruang lingkup politik.

Politik tidak hanya berperan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, tetapi juga sebagai medium untuk mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam konteks berbangsa dan bernegara. Politik yang mendukung tujuan dakwah adalah politik yang sepenuhnya menghormati dan mengedepankan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, perlu dicatat bahwa kehidupan politik yang islami tidak memberikan ruang bagi sekularisasi, meskipun sebagian orang memandang sekularisasi sebagai proses yang tidak terhindarkan dalam modernisasi. Untuk mencapai tujuan dakwah, politik harus sejalan dengan prinsip-prinsip agama dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam setiap aspek pemerintahan serta pengambilan keputusan (Rais, 1987: 28).

Secara faktual, politik sekuler sering kali mengabaikan pentingnya nilai-nilai agama dan memandang agama sebagai bagian dari masa lalu yang tidak lagi relevan dalam kehidupan publik. Meskipun agama masih dianggap penting dalam ranah pribadi, namun dianggap sebagai faktor yang dapat menghambat kemajuan dalam konteks publik. Dampak dari proses terestrialisasi dan sekularisasi manusia, beserta materialisme dan humanisme yang berkembang, cenderung untuk mengurangi nilai-nilai spiritual dalam kehidupan dan akhirnya mengangkat manusia itu sendiri sebagai pusat keagungan. Ketika manusia mulai mengangkat dirinya sendiri, mereka mungkin kehilangan kendali dan kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, yang dihormati dan yang dikecam (Rais, 1987: 29).

Politik semata-mata bukanlah sekedar tentang pemerintahan, tetapi juga ada peran keagamaan didalamnya, tidak dapat dipisahkan antara politik dengan keagamaan, dua hal tersebutlah yang harus selalu dibersamai agar terhindar dari pemikiran pemikiran sekularisme.

Pandangan terhadap sekularisme sangat berbahaya bagi masyarakat Indonesia karena, pada dasarnya politik dan keagamaan adalah dua hal yang perlu digabungkan agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak semena-mena saja tetapi, berlandaskan pada apa yang sudah diperintahkan dalam agama dan pro terhadap masyarakat tidak menguntungkan suatu belah pihak saja.

Upaya dakwah yang dilakukan oleh salah satu partai yang ada di Indonesia yaitu PKS, yang mencampuri antara urusan politik dengan keagamaan. PKS membangun komunitas keagamaan untuk menyebarkan serta mempelajari hal hal yang berkaitan dengan keagamaan maupun politik. Pada hakikatnya semua manusia di muka bumi ini hidup berdasarkan landasan-landasan dari agama termasuk hal yang berkaitan pada bidang politik sebagai bentuk ketaatannya kepada Tuhan dan agar terhindar dari bala dan marabahaya.

3. Urgensi Dakwah Siyasah

Dalam ajaran agama Islam dakwah memiliki kedudukan yang sangat tinggi, dakwah merupakan kewajiban bagi umat Islam yang sudah mencapai usia *baligh*. Kesejahteraan agama Islam bergantung kepada orang-orang yang menyebarkan dan memperluas ajaran agama Islam. Mengajarkan ajaran agama Islam tidak hanya dilakukan di masjid dan tempat belajar, tetapi juga bisa dilakukan pada ruang lingkup kegiatan politik.

Umat Muslim menganggap suatu tindakan politik merupakan hal yang baik bila tindakan tersebut berbobot dan berguna bagi seluruh masyarakat sesuai dengan anjuran agama islam yaitu “*rahmatan lil alamien*”. Dalam tinjauan Islam terdapat dua makna politik, yaitu politik kualitas tinggi (*high politics*) dan politik kualitas rendah (*low politics*). (Rais, 2004: 10) menuturkan Terdapat tiga tanda yang perlu dimiliki untuk terselenggaranya “*high politics*” yaitu:

- a. Setiap jabatan politik pada dasarnya merupakan tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat yang harus dijaga dengan baik. Tanggung jawab tersebut tidak boleh disalahgunakan, seperti untuk tujuan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu, sementara mengabaikan kepentingan publik.
- b. Setiap jabatan politik membawa beban tanggung jawab atau mas'uliyah. Seperti yang diajarkan oleh Nabi Saw., setiap individu pada dasarnya adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas kepemimpinannya atau tugas-tugasnya. Kesadaran akan tanggung jawab ini sangat krusial dalam upaya kita untuk menjalankan politik yang berkualitas tinggi.
- c. Kegiatan politik harus erat terkait dengan prinsip *ukhuwah* (*brotherhood*), yang mencakup persaudaraan di antara semua manusia. *Ukhuwah* ini berarti persatuan yang melampaui perbedaan etnik, ras, agama, latar belakang sosial, keturunan, dan lain-lain. Oleh karena itu, kegiatan politik yang bersifat konfrontatif dan penuh konflik serta menganggap pihak lain sebagai musuh yang harus dihapuskan tidak sesuai dengan prinsip ini.

Politik pada hakikatnya merupakan salah satu kendaraan untuk berdakwah dan mengenalkan ajaran agama Islam secara *kaffah* karena, didalam politik terdapat nilai-nilai ajaran agama Islam yang harus diperjuangkan ketika terjun ke dalam dunia politik mulai dari menjaga amanah yang telah diberikan dan mempererat tali persaudaraan agar tidak terjadi perpecahan.

Urgensi dakwah *siyasah* untuk mengembangkan pemahaman yang seimbang terkait nilai-nilai keagamaan dalam partisipasi di dunia politik, serta membimbing umat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam membangun masyarakat yang adil, kompeten berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam.

Dari perspektif Islam, politik jenis "low politics" sebenarnya tidak mendukung tujuan dakwah, malah dapat menghambatnya dan merusak upaya rekonstruksi masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam (Rais, 2004: 13) menyatakan bahwa Ciri-ciri *low politics* yaitu:

- a. Membenarkan semua metode mendorong individu yang terlibat dalam politik untuk menjadi tidak berbelas kasihan atau dingin emosinya. Mengabaikan kepentingan orang lain demi mencapai tujuan pribadi dianggap sebagai tindakan yang dapat diterima.
- b. Penguasaan mutlak terhadap lawan politik dianggap sebagai tujuan tertinggi atau kebajikan yang paling utama. Lawan politik tidak boleh diberi kesempatan untuk memulihkan diri dan, jika perlu, mereka diperlakukan sebagai objek bukan manusia. Politik dipahami sebagai perjuangan untuk mengambil alih kekuasaan, dan ketidakstabilan pemerintahan seringkali disebabkan oleh ambisi tak terbatas manusia.

- c. Dalam melakukan tugas politik, seorang penguasa dianggap perlu memiliki kemampuan untuk bermain seperti binatang buas, terutama seperti singa dan hewan pemburu lainnya.

Politik yang seperti *low politics* inilah yang tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan didalam agama Islam. Politik bukanlah suatu hal untuk ambisi pribadi melainkan tentang kemaslahatan, kesejahteraan dan kepentingan umat agar diridhai oleh Allah SWT. Agar dapat mencegah terjadinya hal-hal yang buruk dalam politik umat Islam diwajibkan untuk menyebarkan ajaran-ajaran agama islam atau yang biasa disebut dengan dakwah.

Pada era modernisasi ini dakwah dapat dilakukan dimana saja dan di bidang apa saja terutama pada bidang politik. Politik merupakan aspek yang tidak terlepas dari ajaran agama islam, harus dapat dipastikan dakwah dan politik merupakan suatu hal yang selaras dan harus digabungkan serta tidak dapat terpisahkan karena, banyak nilai-nilai ajaran agama islam yang harus dituangkan dalam berpolitik.

B. Partai Politik

1. Definisi Partai Politik

Partai politik memiliki peran krusial dalam sistem demokrasi, karena menyediakan platform bagi warga negara untuk terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Sebagai sarana partisipasi, partai politik memungkinkan warga untuk ikut serta dalam proses penentuan penyelenggara negara di berbagai lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan prinsip keterbukaan bagi seluruh warga negara, anggota partai politik berasal dari berbagai lapisan masyarakat, sehingga partai politik dapat berfungsi sebagai alat untuk

mengintegrasikan nasionalisme, persatuan bangsa, dan kesatuan negara. (Hafsah, 2011).

Partai politik dapat didefinisikan sebagai kelompok yang aktif berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan tujuan menempatkan calon-calon mereka dalam jabatan publik. Selain itu, fungsi utama partai politik meliputi berbagai proses penting dalam sistem politik, seperti sosialisasi politik untuk mendidik masyarakat, penggabungan dan pengungkapan kepentingan untuk memastikan suara berbagai kelompok terdengar, perekrutan kepentingan untuk membangun dukungan, serta komunikasi politik untuk menjalin hubungan antara pemerintah dan masyarakat (Rohaniah, 2017: 62).

Dalam struktur politik modern, partai politik memainkan peran penting dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Partai politik sering disebut sebagai penyambung "lidah rakyat". Partai politik sering disebut sebagai penyambung "lidah rakyat" karena mereka bertindak sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah. Dengan menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan warga negara, partai politik berfungsi untuk memastikan bahwa suara rakyat didengar dan diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan (Nurdin, 2019: 17).

Untuk memahami asal usul dan perkembangan partai politik Menurut para ahli Joseph Lapalombra & Myron Weiner (1998), terdapat tiga teori yang dapat menerangkan asal usul dan perkembangan partai politik (Sitepu, 2012: 185), yaitu:

- a. teori kelembagaan menyatakan bahwa terdapat hubungan antara perkembangan parlemen awal dan munculnya partai politik.
- b. teori situasi historik yang menyatakan bahwa partai politik muncul sebagai respons sistem politik terhadap krisis yang diakibatkan oleh perubahan masyarakat secara menyeluruh.
- c. teori pembangunan yang menyatakan partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.

Dalam banyak teori dan penjelasan tentang pembentukan suatu bangsa atau negara, ditekankan bahwa warga dan warga negara merupakan elemen kunci dalam membentuk komunitas dan kesatuan politik yang menentukan keberadaan suatu bangsa dan negara. Hal ini sangat bergantung pada kehendak politik dari rakyat atau warga serta warga negaranya sendiri. kemunculan partai politik sering kali terkait dengan perkembangan awal sistem parlementer, di mana struktur dan fungsi parlemen mendorong pembentukan kelompok-kelompok politik terorganisir untuk mewakili berbagai kepentingan (Triyono, 2022: 33).

Dalam studi politik, partai politik sering kali dianggap sebagai elemen sentral dalam sistem pemerintahan suatu negara. Partai politik merupakan elemen kunci dalam dinamika politik sebuah negara. Partai politik sering dipandang sebagai sarana bagi individu atau kelompok untuk mencapai kekuasaan. Pandangan semacam ini telah sering dibahas dalam berbagai media dan seminar yang membahas tentang peran dan fungsi partai politik (Rosana, 2012: 137).

2. Fungsi dan Tujuan Partai Politik

Dalam sistem pemerintahan demokratis, partai politik memegang posisi yang sangat strategis. Sebagai kelompok terorganisir yang memiliki tujuan dan cita-cita yang jelas, partai politik berperan sebagai penghubung utama antara masyarakat dan pemerintah. Melalui partai politik, aspirasi dan kepentingan rakyat dapat diartikulasikan dan disampaikan secara efektif, memastikan bahwa suara mereka didengar dan diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan (Jafar, 2017: 139).

Partai politik dibentuk dalam berbagai konteks pemerintahan, baik itu konservatif atau revolusioner, didukung oleh kelompok elit atau massa, serta berada dalam sistem pluralis demokrasi atau diktator monolitis, dengan tujuan utama yaitu untuk memegang peran dalam pengelolaan kekuasaan politik. Fungsi tersebut terwujud saat partai politik terlibat dalam pembentukan pemerintahan atau saat berperan sebagai oposisi. Kedua fungsi ini memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan nasional (Thoha, 2016: 95).

Dalam sistem demokrasi, peran partai politik sangat penting dalam menjembatani kepentingan masyarakat. Partai politik berfungsi sebagai manifestasi institusional dari kepentingan individu dan kelompok serta penggabungan berbagai kepentingan, yang menegaskan perannya sebagai lembaga demokrasi yang bertanggung jawab untuk memperjuangkan tercapainya produk hukum yang demokratis. Partai politik tidak hanya berperan sebagai wadah aspirasi, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam pembentukan kebijakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi (Toloh, 2023: 23).

Partai politik dalam sistem negara demokrasi berbeda dengan negara otoriter. Di negara demokrasi, pelibatan masyarakat dalam politik dipandang sebagai representasi kehendak dan aspirasi warga melalui partisipasi dalam proses politik seperti pemilihan umum dan debat kebijakan. Namun, di negara otoriter, elite politik sering menginterpretasikan pelibatan masyarakat dalam politik sebagai upaya untuk mengarahkan dan mengontrol opini publik sesuai dengan tujuan penguasa (Budiarjo, 2014: 408).

Dalam konteks memperkuat kualitas demokrasi, partai politik memegang peranan penting dengan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang mendukung sistem demokrasi yang sehat. (Hafsah, 2011: 27-28) menyebutkan bahwa Partai politik memiliki tiga fungsi untuk menaikkan kualitas demokrasi, yaitu:

- a. Fungsi representasi, dalam konteks partai politik mengacu pada kemampuannya untuk menjadi sarana bagi pemilih dalam menyalurkan aspirasi mereka. Misalnya, aspirasi politik dari berbagai variasi ideologi umat Islam dapat diwujudkan melalui pembentukan partai yang berbasis ideologi Islam.
- b. Aspirasi dan kepentingan politik pemilih kemudian dirumuskan menjadi kebijakan-kebijakan partai yang lebih rinci, yang dikenal sebagai fungsi agregasi. Dalam fungsi ini, pemilih diberi kesempatan untuk memilih ketua dan pengurus partai yang dianggap mampu merealisasikan kebijakan-kebijakan yang mencerminkan aspirasi mereka sebagai konstituen

- c. Partai politik juga dapat berperan sebagai pengimbang kekuasaan, baik sebagai oposisi maupun sebagai bagian dari pemerintah eksekutif yang ikut mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah.

Partai politik juga memiliki beberapa fungsi tambahan yang mendukung dan memperkuat struktur politik dan pemerintahan. (Sitepu, 2012: 189-192) menyatakan Partai politik memiliki beberapa fungsi lainnya, yaitu:

- a. Sebagai alat komunikasi politik

Komunikasi politik sebagai bagian penting dari input dalam sistem politik adalah proses penyampaian informasi politik. Melalui media komunikasi ini, informasi politik dapat disampaikan. Dalam konteks terminologi sistem politik, media yang dikenal adalah partai politik. Partai politik berfungsi mengumpulkan berbagai kepentingan, aspirasi, pendapat, dan tuntutan, kemudian merujuknya pada bagaimana masyarakat merumuskannya dalam format yang lebih terstruktur untuk diartikulasikan.

- b. Sebagai alat sosialisasi politik

Indoktrinasi politik merujuk pada proses dimana penguasa menggunakan berbagai forum dan metode untuk memobilisasi serta memanipulasi warga agar menerima nilai-nilai, norma, dan simbol yang dianggap sebagai ideal dan positif oleh penguasa. Dalam sistem politik totaliter, partai politik menjalankan fungsi indoktrinasi politik melalui pengarahannya yang menggunakan tekanan psikologis dan latihan disiplin.

c. Sebagai alat rekrutmen politik

Tujuan utama partai politik adalah terlibat dalam politik praktis dan pemerintahan. Untuk itu, salah satu fungsi penting partai politik adalah melakukan rekrutmen politik guna mengisi berbagai posisi yang diperlukan dalam lembaga-lembaga politik negara, seperti DPR

d. Sebagai alat partisipasi politik

Dalam analisis politik modern, partisipasi politik dianggap sebagai isu penting yang semakin banyak dipelajari terkait dengan perkembangan dan perubahan politik di negara-negara berkembang.

e. Sebagai alat pengatur konflik

Potensi konflik ada di setiap masyarakat, terutama yang ditandai dengan heterogenitas berdasarkan etnis, agama, ras, dan ketimpangan sosial-ekonomi yang signifikan. Setiap perbedaan ini memiliki potensi untuk menimbulkan konflik. Keanekaragaman atau kemajemukan masyarakat dapat diamati melalui dua dimensi: horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal mencakup keragaman suku bangsa, bahasa, kebiasaan, ras, dan agama, yang semuanya mencerminkan keberagaman budaya politik suatu negara atau masyarakat.

Di sisi lain, dimensi vertikal menyoroti polarisasi yang terjadi berdasarkan stratifikasi sosial, termasuk polarisasi kekuatan politik dan kepemilikan ekonomi dalam masyarakat.

Partai politik berperan sebagai pengarah dalam menyelaraskan berbagai kepentingan yang berbeda atau bahkan bertentangan. Menggabungkan semua kepentingan yang beragam, kemudian melakukan analisis mendalam, serta

mengadvokasi pembentukan kebijakan merupakan bagian dari alternatif kebijakan publik. Proses ini dikenal sebagai fungsi pengelolaan kepentingan. Partai politik juga dapat berfungsi sebagai kontrol politik, di mana kegiatan ini menyoroti kesalahan dan penyimpangan dalam perumusan kebijakan yang dilakukan oleh badan pemerintahan. Tujuan dari kontrol politik ini adalah agar dilaksanakan melalui pengawasan yang objektif dan standar yang jelas, sehingga tidak terpengaruh oleh subjektivitas (Ulfa, Utami, Mubrani, 2024: 5).

Dalam dunia politik tentunya partai politik berperan sangat penting untuk menjadi sarana serta kendaraan bagi masyarakat untuk menuangkan aspirasi, melatih diri dalam berorganisasi dan sebagai pengawas bagi pemerintahan agar pemerintahan berjalan dengan seimbang dan tidak mengeluarkan kebijakan yang merugikan dan tidak berpihak kepada masyarakat.

Berpartisipasi dalam partai politik tidak sekedar ikut-ikutan dan bergabung begitu saja untuk mengurus perkara pemerintahan akan tetapi, harus memiliki ilmu dan pengetahuan yang cukup agar fungsi dan tujuan politik dapat dilaksanakan dengan sempurna. Oleh karena itu perlu bagi orang yang gabung ke dalam partai politik untuk mengikuti pendidikan yang berkaitan dengan dunia politik sebelum ikut berpartisipasi dalam partai politik.

Tujuan umum dari pendidikan politik bagi kader bangsa adalah untuk memberikan bekal pengetahuan yang dapat memperluas pemahaman mereka terhadap politik. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menanamkan nilai-nilai peradaban politik kepada rakyat dan pemuda secara luas. Akibatnya, pendidikan politik diharapkan mampu menghasilkan kader-kader yang

siap menjadi penerus dalam perjuangan bangsa dan pembangunan nasional (Affandi, Idrus, 2021: 11).

Pembinaan pemuda dengan nilai-nilai Pancasila memerlukan kondisi yang mendukung dan melibatkan semua potensi serta sarana pembinaan pemuda yang tersedia. Dalam upaya memperkuat sistem politik, peran serta pemuda tetap penting. Oleh karena itu, pemuda perlu terus mengembangkan karakteristik yang telah membentuk sejarah perjuangan mereka di masa lalu, sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan sosial, kebangsaan, dan negara dalam era pembangunan Indonesia. Organisasi pemuda diharapkan dapat mengakomodasi dan mengarahkan aspirasi masyarakat serta aktif berperan sebagai bagian yang dinamis dan khas dari kehidupan sosial masyarakat (Affandi, Idrus, 2021: 13).

Peran pemuda sangat penting di dunia politik, karena pemuda-pemuda inilah yang meneruskan dan menentukan arah bangsa ini selanjutnya. Partai politik perlu melakukan pembinaan terutama kepada pemuda-pemudanya agar di masa yang akan datang dapat menjadi kader yang berkompeten dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam partisipasinya untuk membangun negeri ini. Peran pemuda dalam dunia politik merupakan aspek yang penting dan strategis dalam konteks pembangunan sosial dan politik suatu negara, di mana mereka diharapkan dapat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan politik serta menyuarakan aspirasi dan kepentingan generasi muda secara efektif dan berkelanjutan.

Pemuda merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia yang telah memiliki hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam dunia politik. Oleh karena itu pendidikan politik sejak awal merupakan langkah penting bagi partai politik untuk

membentuk calon kader yang kompeten agar nantinya dapat amanah dalam menuangkan aspirasi masyarakat untuk membuat kebijakan yang pro terhadap masyarakat.

Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan yang demokratis memungkinkan rakyat untuk meminjamkan atau mendelegasikan kekuasaan dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan kepada legislatif, eksekutif, yudikatif, administrator, atau kepada siapa pun yang dipilih sebagai wakil mereka. Rakyat dianggap berdaulat selama mereka, dan bukan wakilnya, masih memegang kekuasaan tertinggi (ultimate power) untuk memutuskan, di mana kekuasaan untuk mengambil keputusan tetap berada di tangan mereka dan dapat didelegasikan kepada individu yang dapat bertanggung jawab selama periode tertentu. (Thoha, 2016: 100).

Konsep partisipasi politik merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya memengaruhi keputusan politik yang dibuat oleh sistem politik atau pemerintahan. Partisipasi ini mencakup pengajuan pendapat atau ekspresi kepentingan masyarakat yang berpotensi mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Dengan kata lain, partisipasi politik adalah bentuk keterlibatan masyarakat dalam aktivitas politik yang bertujuan untuk memengaruhi proses pembuatan keputusan dalam sistem politik (Rohaniah, 2017: 281).

Seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berpihak kepada rakyat Indonesia karena Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, tidak boleh pemerintah membuat kebijakan sepihak yang hanya menguntungkan suatu golongan tertentu. Hal tersebut merupakan prinsip dasar dalam sistem demokrasi di

mana keputusan politik diambil berdasarkan kehendak dan partisipasi aktif dari seluruh warga negara.

3. Urgensi Partai Politik

Urgensi partai politik terletak pada perannya sebagai pengorganisasi dan perwakilan aspirasi politik masyarakat, serta sebagai pemegang tanggung jawab dalam pembentukan kebijakan publik dan menjaga stabilitas politik dalam suatu negara.

Partai politik merupakan organisasi yang menghimpun anggota-anggota dengan visi dan misi yang seragam untuk mencapai tujuan partai. Partai politik berperan sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah melalui kader-kader yang berhasil memenangkan pemilihan umum, baik di jabatan eksekutif maupun legislatif. Selain itu, partai politik berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap penggunaan kekuasaan yang berpotensi untuk dilakukan secara sewenang-wenang, dengan melakukan oposisi terhadap partai politik lainnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menyatukan visi dan kepentingan yang sama demi kemajuan bangsa dan negara yang lebih sejahtera, yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh elit politik sebagai perwakilan dari mandat rakyat melalui mekanisme partai politik (Kodiman & Fatimah, 2023: 88).

Dalam masyarakat modern, peran kelompok kepentingan, termasuk partai politik, menjadi semakin penting dalam menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kelompok-kelompok kepentingan (*interest group*) seperti partai-partai politik adalah satu organisasi yang dibentuk untuk dapat menjadi jembatan antara kepentingan pemerintah di satu sisi dan kepentingan masyarakat di sisi lain,

dalam masyarakat modern (Rohaniah, 2017: 333).

Dalam struktur pemerintahan modern, partai politik memainkan peran yang sangat penting. Partai politik bertugas untuk mengatur dan menggabungkan berbagai kepentingan masyarakat yang berbeda-beda, dengan maksud untuk memasukkan kepentingan tersebut ke dalam kebijakan publik yang dapat memberikan keuntungan bagi kelompok mereka dan masyarakat luas. partai politik tidak hanya berfungsi sebagai wadah aspirasi, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan bermanfaat bagi semua pihak (Rohaniah, 2017: 334).

Setiap partai politik memiliki cara-cara tertentu untuk menangani tuntutan dan aspirasi masyarakat. Mekanisme yang digunakan untuk merumuskan dan menanggapi tuntutan, aspirasi, serta kepentingan dari masyarakat. Individu atau kelompok dalam masyarakat menggunakan berbagai cara untuk menyampaikan kepentingan dan aspirasi mereka kepada lembaga politik atau pemerintah. sistem politik dapat memastikan bahwa suara masyarakat diperhatikan dan diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan (Sitepu, 2012: 195).

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dan efektif dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam melalui lembaga-lembaga negara yang tinggi. Misalnya, berperan dalam merancang undang-undang melalui lembaga legislatif, melaksanakan undang-undang melalui eksekutif, dan mengawasi penerapan undang-undang melalui yudikatif.

Partai politik juga merupakan tempat di mana berbagai pihak dapat bermusyawarah untuk menghasilkan keputusan yang mewakili beragam pandangan dan kepentingan masyarakat. Seperti yang disebutkan dalam Q.S. Ali-Imran/3:159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Kemenag, 2024)

1. Partai Politik Dalam Media Dakwah

Dakwah dapat dilakukan dimana saja dan melalui apa saja termasuk melalui ruang lingkup politik. Partai politik memainkan peran penting sebagai media dakwah untuk mengedepankan nilai-nilai agama dalam proses pembentukan kebijakan publik dan dalam mempengaruhi arah perubahan sosial masyarakat. Melalui partisipasi aktif dalam politik, partai-partai ini mempromosikan moralitas, integritas, dan kesejahteraan berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan.

Kehadiran beberapa partai politik yang berbasis Islam pada zaman reformasi harus dianggap sebagai anugerah, dan umat Islam seharusnya menyambutnya dengan antusias. Diharapkan partai-partai tersebut dapat bersatu atau bekerja sama untuk mendorong kebaikan dan menolak keburukan.

Meluasnya praktik dakwah dalam kehidupan manusia menunjukkan bahwa dakwah dapat dilakukan dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan politik, terutama jika dakwah dilihat sebagai upaya untuk membentuk masyarakat yang beradab (Suryana, 2021: 4).

Periode reformasi di Indonesia merupakan momen krusial yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan politik dan sosial di negara ini. Periode reformasi secara alami menjadi aspirasi bagi semua warga Indonesia, khususnya umat Islam yang memanfaatkan momentum ini dengan mendirikan partai politik berbasis Islam. Banyak kelompok Islam mendirikan partai politik berbasis Islam untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi mereka dalam sistem politik yang baru. Pendekatan ini memungkinkan umat Islam untuk lebih aktif terlibat dalam proses politik dan mempengaruhi arah kebijakan nasional sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama mereka (Syukur, 2014: 71).

Dengan hadirnya partai-partai Islam di Indonesia umat muslim dapat menjadikannya sebagai salah satu kendaraan untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Partai politik tentu dapat berperan menjadi tempat berdakwah dan mengenalkan ajaran agama Islam dengan membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah SWT di dalam kita suci umat Islam.

Setiap Muslim yang terlibat dalam partai politik, seperti PDIP, GOLKAR, PPP, atau partai lainnya, harus menyadari bahwa mereka bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia. Mereka juga harus menyadari bahwa mereka memikul tanggung jawab dari Allah, di mana mempromosikan *amar ma'ruf*

nahi munkar adalah pilihan yang harus dijunjung tinggi dalam setiap langkah politik mereka. Jika organisasi Islam dapat membimbing umatnya ke arah ini, maka tidak menjadi masalah jika kader organisasi tersebut terlibat dalam berbagai partai politik, yang terpenting adalah tujuan mereka adalah mencapai kesejahteraan rakyat (Syukur, 2014: 40-41).

Jika tujuan berpartai Islam adalah untuk secara sungguh-sungguh mengembangkan dakwah dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar, baik dalam urusan ibadah maupun dalam muamalah seperti ekonomi, sosial, politik, serta hubungan antar bangsa dan negara di seluruh dunia. Sebaliknya, jika berpartai hanya dimanfaatkan sebagai sarana untuk meraih kekuasaan, memanfaatkan dukungan massa rakyat, dan mengagungkan individu dalam partai, hal ini berpotensi mengakibatkan konsekuensi yang serius. Krisis dalam keyakinan dan keberanian dapat terjadi, yang juga bisa menyebabkan krisis identitas bagi umat Muslim dan bangsa. Oleh karena itu, kelompok partai semacam ini, meskipun disebut berlabel Islam, mungkin akan dinilai oleh Allah bukan sebagai umat yang terbaik, tetapi sebagai umat yang paling buruk (Moekry, 1999: 30).

Umat Islam harus memaksimalkan ruang untuk berdakwah dengan mengoperasionalkan partai-partai yang ada, menjunjung tinggi hak-hak masyarakat Indonesia dalam bernegara dan tidak menjadikan partai sebagai batu loncatan untuk diri sendiri maupun kelompok tertentu. Seperti halnya yang dilakukan oleh PKS(PKS) yang menjadikan partai politik sebagai salah satu sarana dan media untuk berdakwah melalui pembinaan kepada kader kadernya.

Back ground PKS adalah sebuah gerakan dakwah. Oleh karena itu, dalam manajemen partainya, PKS juga menerapkan model-model pembinaan anggota yang mirip dengan pendekatan gerakan dakwah. Semua anggota partai diharuskan untuk mengikuti proses pembinaan secara rutin agar menghasilkan kader-kader partai yang memiliki pemahaman Islam yang komprehensif dan kesungguhan dalam menjalankan program partai. Semakin tinggi komitmen kader terhadap seluruh program pembinaan partai, maka tingkat keanggotaan kader secara otomatis akan semakin meningkat (Siregar, 2019: 8).

Untuk menjaga kelangsungan dakwah, Rasulullah juga melaksanakan proses pengembangan kader secara berkelanjutan untuk meneruskan ajaran Islam kepada generasi berikutnya. Ajaran Islam tidak hanya dipahami dan diterapkan oleh generasi saat ini, tetapi juga diteruskan kepada generasi berikutnya. Dengan melatih dan membimbing kader-kader baru, Rasulullah membangun fondasi yang kuat untuk penyebaran dan pelestarian ajaran Islam, sehingga dakwah dapat terus berkembang dan mempengaruhi kehidupan umat di masa depan (Mufarrohah, 2016: 5).

Pendekatan PKS dalam menerapkan model pembinaan anggota yang didasarkan pada gerakan dakwah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemahaman Islam yang mendalam dan pengembangan kader yang berkualitas menunjukkan bahwa PKS menjadikan partai politik sebagai salah satu kendaraan untuk berdakwah.

C. Komunitas Pengajian Muslim

1. Pengertian Komunitas Pengajian Muslim

Indonesia merupakan salah satu negara dengan muslim terbesar di dunia. Sebagai negara muslim terbesar tentunya banyak sekali ditemukan komunitas keagamaan yang didirikan oleh berbagai tokoh-tokoh agama islam mulai dari komunitas dalam ruang lingkup umum, pendidikan, hingga komunitas keagamaan dalam ruang lingkup politik yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Dalam hal pengembangan lembaga-lembaga Islam, Indonesia sangat beruntung karena memiliki berbagai organisasi yang terhubung dengan Islam, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ini menciptakan peluang yang baik untuk mengembangkan perspektif Islam yang khas Indonesia sesuai dengan bidang usaha masing-masing. Jika dibandingkan dengan dunia Arab, Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar yang memiliki jumlah organisasi Islam yang sangat banyak. Oleh karena itu, secara teori, potensi untuk membentuk wawasan Islam yang karismatik di negara ini sangat besar. Namun, sayangnya, banyak organisasi ini lebih cenderung mengarah pada sektarianisme daripada pada pengembangan wawasan Islam yang khas Indonesia (Zainuri, 2017).

Upaya membentuk masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam, komunitas pengajian muslim memainkan peranan penting dalam menyelaraskan seluruh aspek kehidupan dengan nilai-nilai agama. Komunitas Pengajian muslim merupakan kelompok orang yang seluruh aspek kehidupan mereka—mulai dari cara berpikir, situasi, sistem, nilai, hingga seluruh pertimbangan mereka—berdasarkan pada

ajaran Islam. Ini adalah masyarakat yang sepenuhnya tunduk dan mengabdikan diri kepada Allah SWT (Zainuri, 2017: 5).

Komunitas pengajian muslim biasanya merupakan kelompok sosial yang terdiri dari individu-individu yang berkumpul berdasarkan keyakinan dan praktik keagamaan yang sama. Mereka membentuk jaringan yang kuat dalam memelihara tradisi keagamaan, mendukung satu sama lain dalam kehidupan rohani, serta berkontribusi dalam pelayanan sosial dan kegiatan keagamaan lainnya dalam masyarakat.

Komunitas pengajian muslim merupakan bentuk pendidikan informal di luar lingkungan sekolah yang seharusnya mendapat perhatian dan dukungan dari masyarakat, khususnya dari kalangan pemuda. Hal ini bertujuan untuk membentuk individu yang seimbang antara potensi mental dan spiritual, serta potensi intelektual dalam menghadapi perkembangan zaman yang terus berubah dan semakin maju. Keberadaan komunitas Islam ini memiliki ragam gerakan yang disesuaikan dengan target pasar masing-masing, yang diadaptasi sesuai dengan kemampuan dan karakteristik mereka (Utami, 2019: 2).

Pentingnya peran komunitas pengajian muslim sebagai wadah pendidikan informal yang mendukung pengembangan potensi mental, spiritual, dan intelektual individu, terutama dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Dukungan yang diberikan oleh masyarakat, khususnya generasi muda, merupakan kunci untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas dari komunitas-komunitas ini dalam mencapai tujuan mereka. Ragam gerakan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kapasitas masing-masing anggota komunitas menjadi strategi

yang bijaksana dalam memperluas dampak positif mereka dalam masyarakat luas.

2. Ragam Komunitas Pengajian Muslim

Banyak sekali di Indonesia komunitas-komunitas pengajian sebagai salah satu komunitas kecil yang didirikan untuk meningkatkan keimanan dan memperdalam ilmu agama Islam, adapun contoh komunitas pengajian antara lain yaitu:

a. Majelis Ta'lim

Konsep majelis taklim berakar dari kata-kata Arab seperti jalasa, yajlisu, ijlis, dan majelisun, yang merujuk pada tempat duduk atau area di mana orang berkumpul untuk berdiskusi atau bertukar ide. Sementara itu, taklim berasal dari allama, yuallimu, i'lam ta'liman, yang berarti belajar atau pendidikan. Dengan demikian, majelis taklim dapat diartikan sebagai sebuah pertemuan tempat duduk bersama yang bertujuan untuk melakukan pembelajaran secara non formal, yang dipandu oleh beberapa ustaz atau ustazah (Anwar, 2002: 73).

Dalam konteks pengembangan komunitas lokal, penting untuk memperhatikan peran organisasi-organisasi masyarakat dalam meningkatkan kapasitas kolektif. Majelis taklim, sebagai salah satu bentuk organisasi lokal, memerlukan penguatan yang berfokus pada kemampuan masyarakat untuk bekerja sama, mengatur diri mereka sendiri, dan memobilisasi sumber daya guna menyelesaikan masalah secara bersama-sama (Syafar, 2015: 88).

Di Indonesia, perkembangan kegiatan pengajian di majelis-majelis taklim memiliki dasar sejarah yang mendalam. Kegiatan pembinaan agama Islam, seperti yang berlangsung dalam pengajian di majelis taklim, telah ada sejak kedatangan Islam di Nusantara. Diketahui bahwa penyebaran Islam di Indonesia dilakukan oleh

para wali melalui gerakan dakwah yang menyelenggarakan pengajian di masjid, mushala, madrasah, dan bahkan di rumah-rumah. Pembinaan Islam ini dilakukan dengan cara yang sederhana, tanpa organisasi formal, kurikulum resmi, atau aturan tertentu. Kegiatan ini dipimpin oleh seorang guru yang menjadi pusat bagi komunitas tersebut. Jika dilihat dari perspektif pendidikan modern, jenis pendidikan ini bisa disebut sebagai pendidikan non-formal. Oleh karena itu, pengajian di majelis-majelis taklim dapat dianggap sebagai lembaga pendidikan agama Islam tertua di kalangan umat Muslim (Sarbini, 2010: 77).

Secara umum, kehadiran majelis taklim telah meraih popularitas yang luas dalam masyarakat, yang menyebabkan peran dan fungsi mereka semakin berkembang dan bertambah dari waktu ke waktu. Selain sebagai tempat bagi perempuan untuk mempelajari dan mendalami ajaran agama mereka, majelis taklim juga berperan sebagai platform bagi mereka untuk aktif dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, kemasyarakatan, dan kemanusiaan (Setiawati, 2012: 42).

Majelis taklim berfungsi sebagai sarana untuk membina umat dengan tujuan menyatukan visi dan misi dalam menghadapi berbagai tantangan besar yang dihadapi umat Islam di Indonesia. Hal ini terutama penting setelah Indonesia memasuki era baru, yang dikenal sebagai era reformasi, demokratisasi, transparansi, atau lebih umum disebut sebagai era globalisasi (Anwar, 2002).

Tujuan dari pembentukan majelis taklim adalah sebagai fasilitas menyebarkan dakwah Islam dan mengangkat umat dari kehinaan. Majelis taklim telah mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia, dengan partisipasi dari berbagai kalangan

mulai dari remaja hingga orang tua. Awalnya, terbentuknya majelis taklim ini merupakan upaya umat Islam untuk menyebarkan dakwah melalui masjid-masjid. Saat ini, dakwah tidak lagi terbatas pada lingkungan masjid, melainkan juga tersebar luas di berbagai tempat (Munawaroh & Zaman, 2020: 77).

b. Rohani Islam (ROHIS)

Komunitas rohani Islam termasuk salah satu komunitas gerakan dakwah yang biasa ditemukan pada pendidikan sekolah menengah atas (SMA) sebagai ekstrakurikulerr untuk menunjang masa remaja dengan bekal-bekal ilmu keagamaan yang diharapkan mampu memanfaatkan masa remaja dengan hal-hal yang positif.

Rohani Islam, atau disingkat Rohis, adalah ekstrakurikuler di Sekolah Menengah Atas (SMA) yang terdiri dari berbagai kegiatan berbasis Islam. Tujuan utama dari ekstrakurikuler ini adalah untuk membina akhlak siswa dan siswi agar mereka dapat berkembang menjadi individu yang bermanfaat. Fungsi dari Rohis adalah untuk memberikan wawasan keagamaan baik dalam aspek akademik maupun non-akademik kepada siswa, membentuk karakter dan sikap mereka, serta menumbuhkan kepedulian dalam diri siswa (Pipir Romadi & Siti Norhalida, 2022: 35).

Selain pembelajaran intrakurikuler, ada juga pembelajaran ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler, atau sering disebut ekskul, adalah kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi dan mengembangkan minat serta bakat mereka. Setiap sekolah menawarkan jenis ekskul yang berbeda, sesuai dengan tujuan sekolah dan minat siswa. Salah satu ekskul yang umum ditemukan di banyak sekolah adalah

Kerohanian Islam (Rohis). Rohis berfokus pada pengembangan spiritual siswa, khususnya yang beragama Islam. Melalui ekskul Rohis, diharapkan pemahaman siswa tentang agama mereka dapat meningkat, yang pada gilirannya akan mempengaruhi praktik ibadah mereka (Werdiningsih, 2022: 3).

Rohis juga berfungsi sebagai sarana untuk mengajarkan konsep moderasi dalam beragama. Mengingat bahwa penerapan moderasi beragama memerlukan usaha yang menyeluruh di seluruh lapisan masyarakat, moderasi ini diupayakan agar menjadi pandangan umum di kalangan umat beragama untuk mencapai kerukunan dan kedamaian sosial. Rohis menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berfokus pada aspek keagamaan, termasuk kajian, pengajian, bakti sosial, dan peringatan hari besar Islam (Werdiningsih, 2022: 66).

Dalam perkembangannya, kegiatan yang dilaksanakan dalam ROHIS tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk eksplorasi dan pengembangan intelektual yang berkaitan dengan pengetahuan agama bagi siswa di sekolah. Diharapkan bahwa mereka yang aktif dalam ROHIS akan semakin mendalami dan memahami ajaran agama mereka, serta mampu menginternalisasikan ajaran tersebut dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, kegiatan ROHIS menjadi lebih bervariasi; tidak hanya mencakup acara seremonial seperti PHBI, tetapi juga meliputi pengayaan materi melalui pengajian rutin mingguan, pesantren kilat (Sanlat) di bulan Ramadhan, Latihan Gabungan (LATGAB), Mabit (malam bina iman dan takwa), serta diskusi dan bedah buku Islam (Ropi, 2011: 101).

3. Tujuan Komunitas Pengajian Muslim

Dalam pembentukan komunitas keagamaan tentu memiliki maksud dan tujuan tertentu, seperti untuk menciptakan sebuah wadah yang memungkinkan anggotanya menjalankan ajaran Islam secara lebih konsisten dan terstruktur, serta untuk membimbing sesama umat muslim agar memiliki bekal keagamaan yang cukup dan dapat menerapkan dan mengamalkannya didalam kehidupan sehari-harinya.

Tujuan komunitas pengajian dalam Islam adalah untuk membantu individu memahami makna dan tujuan hidup, meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kepada Allah, serta mencapai pemahaman Islam yang menyeluruh dan komprehensif. Selain itu, bimbingan ini bertujuan untuk menjadikan pengetahuan agama dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat memberikan motivasi dan dorongan dalam proses pendalaman pemahaman agama. (Irfan, 2023).

Dalam berbagai aspek kehidupan komunitas, forum keagamaan memainkan peran yang sangat penting. Pengajian, sebagai sebuah forum keagamaan, tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk pendidikan agama, tetapi juga berperan sebagai alat untuk memperkuat hubungan sosial dan nilai-nilai moral dalam masyarakat (Fitri, dkk, 2024: 74).

Tujuan dari komunitas pengajian muslim adalah untuk memfasilitasi pemahaman mendalam tentang arti dan makna hidup, memperkuat kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah, serta mencapai pengetahuan Islami yang menyeluruh dan terintegrasi. Selain itu, bimbingan ini bertujuan untuk membuat pengetahuan agama dapat diakses oleh seluruh masyarakat, sehingga dapat memberikan motivasi dan dorongan dalam mendalami agama. Agar tujuan ini

tercapai dengan efektif, penting untuk memberikan prioritas kepada muallaf, terutama dalam mencapai tujuan jangka pendek, seperti memahami dan mengikuti tuntutan Al-Quran melalui proses bimbingan keagamaan (Widodo, 2019: 86).

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan dapat dipahami bahwa Tujuan dari komunitas pengajian dalam Islam adalah untuk membantu individu memahami makna dan tujuan hidup, meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, serta mencapai pengetahuan Islami yang menyeluruh. Selain itu, bimbingan ini bertujuan untuk membuat pengetahuan agama dapat diakses oleh seluruh masyarakat, memberikan motivasi dan dorongan dalam proses pendalaman pemahaman agama. Pengajian sebagai forum keagamaan, tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendidikan agama, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat hubungan sosial dan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Dalam hal ini, agar tujuan tersebut tercapai dengan efektif, penting untuk memberikan prioritas kepada muallaf dalam bimbingan keagamaan, khususnya dalam memahami dan mengikuti tuntutan Al-Quran untuk mencapai tujuan jangka pendek mereka.